

Relawan Demokrasi Sebagai Komunikator Politik Bagi Pemilih Pemula

Oleh : Susilastuti

susilastuti@gmail.com

Adi Soeprapto

adi_soeprapto@yahoo.com

Basuki Agus Suparno

basuki.agus@gmail.com

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPNVY

Alamat email : susilastuti@gmail.com, adi_soeprapto@yahoo.com basuki.agus@gmail.com,

Abstrak

Pemilih pemula merupakan kelompok strategis dalam pemilu 2014. Data BPS menyebutkan, tidak kurang dari 15% pemilih pada Pemilu 2014 adalah pemilih pemula. Kelompok ini menjadi salah satu dari lima segmen strategis yang mendapatkan perhatian khusus untuk kegiatan sosialisasi politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu legislative dan DPD membentuk relawan demokrasi (Relasi) ini merupakan pelopor-pelopor demokrasi yang menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diambil dengan menggunakan wawancara terstruktur dan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan mantan Relasi KPU Kota/Kabupaten. Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengembangan Model Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula ditemukan bahwa relawan demokrasi sebagai komunikator politik mampu menjelaskan pesan politik dalam bahasa anak muda, sehingga lebih mudah dipahami. Password “satu suara bisa mengubah masa depan bangsa” selalu digunakan untuk menarik minat pemilih pemula menggunakan hak pilihnya. Keberadaan Relasi ini hanya bersifat “project” sehingga ketika pemilu legislative usai maka Relasi ini juga dibubarkan. Penelitian ini merekomendasikan agar mantan Relasi ini dijadikan sebagai agent bagi pemilih pemula untuk mendiskusikan masalah-masalah politik. Keterlibatan pemilih pemula dalam pemilu juga akan memunculkan kesadaran kritis dan tanggungjawab atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci : Relawan Demokrasi, Komunikator Politik, Pemilih Pemula

I. Pendahuluan

Kehadiran relawan demokrasi (Relasi) pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2014 khususnya Pemilu memilih DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kota/kabupaten dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi kepada lima segmen masyarakat. Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran.

Pelopor-pelopor demokrasi ini dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika

sosial politik berbangsa dan bernegara. Rekrutmen Relasi ini dilakukan oleh KPU kota/kabupaten diharapkan bisa lebih mendorong kelima segmen pemilih strategis menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014.

Kelima segmen ini diasumsikan oleh KPU sebagai kelompok yang belum terjangkau secara maksimal untuk pendidikan politik, informasi tentang kepemiluan (mekanisme pendaftaran, system pencoblosan dll-red). Pemilih pemula menjadi salah satu segmen pemilih strategis karena kelompok ini dipandang sebagai kelompok yang belum mempunyai pilihan atau massa mengambang.

Kelompok pemilih pemula dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia antara 17 tahun -21 tahun ini ditengarai menjadi kelompok yang diperebutkan karena mereka belum memiliki sikap politik. Apabila kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang politik, pemilu, partisipasi politik dan lainnya, akan menjadi pemilih yang tidak cerdas atau ada keengganan untuk menggunakan hak pilihnya alias golput. Data BPS menyebutkan, tidak kurang dari 15% pemilih pada Pemilu 2014 adalah pemilih pemula. Selain itu data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu menunjukkan, data pemilih berumur 10 – 20 tahun berjumlah 46 juta, dan data pemilih berumur 20 – 30 tahun berjumlah 14 juta, sehingga perkiraan jumlah pemilih pemula sekitar 50 jutaan (www.kpu.go.id akses 7 Juni 2015).

Pemilih pemula, menjadi segmen masyarakat yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini karena kelompok ini memang paling rentan untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena pemilih pemula masih minim pemahamannya tentang politik. Kelompok pemilih pemula ini sering disebut sebagai sebagai massa mengambang yang belum mempunyai orientasi pilihan politik. Kelompok ini “menjadi” target sasaran dari partai politik dengan harapan mereka bisa menjadi konstentuennya dan memberikan pilihannya pada saat pemungutan suara.

Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki hak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.

Pemilih pemula bukanlah pemilih yang tidak mempunyai referensi politik sama sekali sehingga sering diasumsikan mereka merupakan kelompok pemilih yang masih bisa dengan mudah dipengaruhi orientasi politiknya, Mengacu pendapat Almond dan Verba (1990: 16) maka

orientasi politik pemula ini dikategorikan menjadi, (1) orientasi kognitif, yaitu pengetahuan tentang dan kepercayaan pada kandidat, (2) orientasi politik afektif, yaitu perasaan terhadap pemilu, pengaruh teman terhadap penentuan pilihan, dan (3) orientasi politik evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat pemilih pemula terhadap parpol/kandidat pilihannya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Setiajid (2011) menguraikan karakter pemilih pemula sebagai berikut: (1) belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS, (2) belum memiliki pengalaman memilih, (3) memiliki antusias yang tinggi, (4) kurang rasional, (5) pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, yang apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu, (6) menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya cukup besar, (7) memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

Setiajid (2011) mengungkapkan bahwa pemilih pemula memiliki kedudukan dan makna strategis dalam pemilihan umum, mengingat : (1) alasan kuantitatif yaitu bahwa pemilih pemula ini merupakan kelompok pemilih yang mempunyai jumlah secara kuantitatif relatif banyak dari setiap pemilihan umum, (2) pemilih pemula adalah merupakan satu segmen pemilih yang mempunyai pola perilaku sendiri dan sulit untuk diatur atau diprediksi, (3) kekhawatiran bahwa pemilih pemula akan lebih condong menjadi golput dikarenakan kebingungan karena banyaknya pilihan partai politik yang muncul yang akhirnya menjadikan mereka tidak memilih sama sekali, dan (4) masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula yang akhirnya muncul strategi dari setiap partai politik untuk mempengaruhi pemilih pemula.

Penelitian yang dilakukan Idrus Makulansenge dkk (2014) menunjukkan, salah satu sarana untuk memberikan informasi politik kepada pemilih pemula adalah melalui iklan. Penelitiannya menyimpulkan reklame politik wilwako mempunyai pengaruh yang cukup terhadap sikap pemilih pemula (20,795). Reklame politik bukan satu-satunya variabel yang mempengaruhi sikap pemilih pemula. Variabel lain yang ikut mempengaruhi adalah faktor lingkungan, faktor pergaulan dimana pemilih pemula tinggal, keluarga, tingkat pendidikan dan nilai-nilai sosial yang dianutnya.

Penelitian tentang pemilih pemula juga dilakukan oleh J.W Batawi (2013) dengan menggunakan metode observasi, wawancara terstruktur. Penelitiannya ingin melihat tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam Pilkada. Hasil penelitiannya, tingkat kesadaran siswa sebagai pemilih pemula menunjukkan perbedaan yang didasarkan pada pemahaman dan pengalaman berpolitik di tingkat persekolahan. Sebagai pemilih pemula, mereka dihadapkan pada persoalan psikologis yaitu menempatkan jati diri dan pemahaman tentang belajar konsep berpolitik yang banyak dipengaruhi oleh pergaulan rekan sejawat dan lingkup persekolahan.

Penelitiannya juga berhasil menemukan, jika dipetakan dari tingkat kesadaran tidak terlepas dari pengalaman yang masih baru dan awam sebagai pemilih pemula sehingga peran guru dan lingkungan persekolahan dapat dijadikan laboratorium berdemokrasi yang komprehensif. Kesadaran ikut aktif berpolitik telah menjadi kekuatan individu siswa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemilih muda pada Pemilu 2014 adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat/karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih generasi sebelumnya. Sebagian besar di antara mereka adalah dari kalangan bersekolah, berstatus ekonomi baik, dan umumnya tinggal di perkotaan atau sekitar perkotaan. Mereka sangat tersentuh kemajuan teknologi informasi, mereka menggunakan alat-alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari handphone, laptop, ipod, ipad, mereka juga menggunakan fasilitas dan jaringan sosial media, seperti internet, twitter, facebook, linked, dan lain-lain dengan sangat baik. Mereka sangat terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru, kritis dan juga mandiri. Mereka menghadapi tantangan yang luar biasa berat mulai dari perubahan politik dan permasalahan dalam negeri yang tidak kunjung jelas arah penyelesaiannya sampai dengan tekanan-tekanan globalisasi, perdagangan bebas, terorisme, intervensi internasional, dan lain-lain. Perbedaan sifat/karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan para pemilih muda Pemilu 2014 perlu dipahami dengan baik, terutama untuk mempersiapkan pemilih muda yang cerdas, kritis dan berorientasi masa depan. Apalagi mereka yang akan berada pada tampuk pimpinan pada saat Indonesia merayakan 100 tahun hari jadinya di tahun 2045.

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan negara Indonesia dan untuk menjaga agar Pemilu 2014 dapat berjalan dengan baik dan output pemilu

memiliki legitimasi yang cukup untuk memimpin pemerintahan, maka program pendidikan politik untuk para pemilih muda Indonesia sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Program pendidikan politik tersebut perlu dilaksanakan dengan cara dan metode baru dengan materi dan kurikulum yang disesuaikan dengan karakter, kebutuhan, kepentingan, minat dan tingkat pengalaman serta pemahaman mereka tentang politik. (Mulyanto Amin, 2014)

Agus Suprojo (2014) juga melakukan penelitian terkait dengan pemilih pemula. Penelitiannya dilatar belakangi pesta demokrasi di Indonesia diadakan sebagai peristiwa politik pada anggota memilih dari legislatif dan wakil presiden eksekutif dan presiden. Pasca reformasi Indonesia telah terbukti bahwa pelaksanaan pesta demokrasi langsung, umum, bebas dan rahasia mampu berlangsung secara damai, namun masih sedikit pengamat yang menganalisis keberlanjutan pemilu mendatang – yang masa depan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Pemilihan Umum Partai 2014 Peserta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Penelitiannya menunjukkan bahawa tingkat partisipasi pemilih pemula 2014 belum menunjukkan standar kepuasan karena kepekaan dan kepemahamannya atas parpol peserta pemilu sebagaimana ketetapan KPU dan UU No 8 tahun 2012 tidak dapat dimengerti.

Faktor penyebabnya adalah (1) apatisme demokrasi pada pemilih pemula semakin tinggi karena pemberitaan politik lebih banyak pada kasus-kasus pelanggaran elite politik pada etika dan ketentuan hukum (2) media informasi politik (internet dan televise) tidak digemari (3) pemilih pemula tidak pernah mendapatkan politik maupun sosialisasi berkenaan dengan pelaksanaan pemilu 2014, (4) KPU harus memperhatikan potensi pemilih pemula yang akan menentikan keberlanjutan demokrasi politik pada pemilu berikutnya. (5) Pembangunan politik dibutuhkan oleh partai politik yang berkepentingan dalam penentuan arah kebijakan pada pemilu 2014.

Berdasarkan paparan di atas, maka ada beberapa indicator tentang pemilih pemula yang perlu dicermati (1) pemilih pemula adalah kelompok pemilih yang strategis sehingga perlu ditangani dengan baik (2) kurangnya informasi politik yang cukup akan mendorong sikap apatisme politik di kalangan pemilih pemula, (3) sekolah menjadi salah satu laboratorium politik bagi pemilih pemula. Berdasarkan indikator ini maka relawan demokrasi sebagai salah satu komunikator politik perlu membuat sebuah strategi komunikasi politik yang baik agar pesan yang disampaikan dipahami dengan baik.

Untuk menjadi komunikator politik yang baik Relasi dengan segmen kelompok pemilih pemula harus memiliki referensi politik, background aktivitas politik dan bekal sebagai propagande (orang yang melakukan kegiatan proganda). Mengapa demikian, pemilih pemula yang menjadi salah satu target kegiatan Relasi ini adalah kelompok yang belum memiliki referensi pilihan politik, pemahaman tentang pemilu masih sangat terbatas.

Kehadiran Relasi yang mengemban tugas untuk memberikan pencerahan tentang segala sesuatu tentang pemilu kepada pemilih pemula diharapkan bisa membantu kelompok ini mempunyai pemahaman tentang pentingnya pemilu sebagai sarana pergantian pimpinan yang paling konstitusional sehingga tidak keliru menggunakan hak pilihnya.

Dalam konteks kegiatan komunikasi politik, Relasi ini menjadi komunikator politik yang akan menyampaikan pesan politik dalam hal ini pemilu kepada komunikan sehingga diharapkan muncul pemahaman yang sama tentang pemilu. Relasi sebagai komunikator politik tentunya diharapkan memiliki referensi yang baik dan mendalam tentang kepemiluan. Berkaitan dengan itu menarik untuk mengetahui bagaimana peran Relasi sebagai komunikator politik bagi pemilih pemula?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang ada di masyarakat (Mantra, 2004) . Menurut Sukardi (2010) penelitian deskriptif hanya berupaya menggambarkan secara jelas dan sekuensial terhadap pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya dan tidak menggunakan hipotesis sebagai petunjuk arah dalam penelitian. Namun demikian, lebih jauh penelitian ini mengidentifikasi kausalitas yang memperlihatkan jalur dan alur bagaimana suatu proses peran Relasi sebagai komunikator politik bagi pemilih pemula. Penelitian tentang peran Relasi sebagai komunikator politik merupakan penelitian yang berupaya untuk menggali informasi secara mendalam mengenai bagaimana Relasi menjalankan fungsinya sebagai komunikator politik.

Informan dalam penelitian ini mantan relawan demokrasi (Relasi) untuk segmen pemilih pemula dari KPUD kota/kabupaten yang ada di DIY. Informan ini digali tentang background aktivitas politiknya sebelum menjadi Relasi, motivasi dan tujuan menjadi Relasi, persiapan yang dilakukan sebelum menjalankan tugasnya sebagai Relasi, pelaksanaan kegiatan Relasi dan evaluasi kendala dan hambatan menjadi Relasi.

Sumber data dalam penelitian ini (1) data primer diambil melalui dialog interaktif, observasi terhadap obyek penelitian, (2) data sekunder berasal dari peraturan terkait dengan pemilu, relawan demokrasi, dokumen, Dokumen dan publikasi yang terkait mengenai pemilu di Daerah Istimewa Jogjakarta, Kertas kerja/TOR/Proposal/laporan kegiatan pendidikan pemilih/sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU maupun pihak lain.

Instrumen penelitian dilakukan melalui (1) wawancara terstruktur kepada pemilih pemula yang pernah ikut kegiatan Relasi (2) *Focus Group Discussion* (FGD), digunakan untuk memperoleh informasi secara terarah dan interaktif akan topik penelitian dengan melibatkan kelompok sasaran dan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah mantan Relasi dari KPUD kota/kabupaten di DIY.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Miles dan Huberman (1994) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Reduksi data (*data reduction*) yang dilakukan dengan merangkum data mengenai pemahaman pemilih pemula atas politik, pelaksanaan pemilu. Kemudian dilanjutkan dengan memfokuskan pada penelaahan mengenai aspek-aspek yang saling berinteraksi dalam proses kegiatan Relasi. Penyajian data (*data display*) yang dilakukan dengan cara narasi dan penyajian grafik dan gambar yang disusun secara sistematis atas hasil skoring kuesioner, dengan melakukan pengelompokan atas item-item pertanyaan dalam kuesioner dan pedoman wawancara untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Kesimpulan /verifikasi yang dilakukan berdasarkan atas hasil reduksi dan penyajian data dengan cara mencocokkan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data, penyajian data dan reduksi data.

III. Hasil Penelitian

Relawan Demokrasi (Relasi) merupakan ujung tombak baru yang ikut membantu KPUD kota/kabupaten. Relasi dibentuk dengan sebuah kesadaran bahwa lembaga penyelenggara pemilu belum mampu menjangkau semua kelompok masyarakat sehingga ada sebagian dari kelompok masyarakat ini yang tidak mendapatkan informasi tentang pemilu dengan baik. Kelompok masyarakat yang disasar Relasi ada lima segmen strategis yaitu pemilih pemula, kelompok marginal, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Masyarakat yang direkrut menjadi Relasi disesuaikan dengan kelompok

sasarannya. Harapannya pesan yang akan disampaikan bisa diterima dengan baik, pada gilirannya mendorong kelompok masyarakat ini berpartisipasi dalam pemilu. Dalam penelitian ini yang menjadi kajian adalah Relasi untuk kelompok masyarakat pemilih pemula.

Selain itu, program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya.”... Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal...” papar Komisioner KPU Pusat Dr.Sigit Pamungkas (wawancara di Jakarta, 3 Maret 2015)

Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (voluntarisme) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu.

Program Relasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2014 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Tujuan program Relasi ini meliputi (1) meningkatkan kualitas proses pemilu, (2) meningkatkan partisipasi pemilih,(3) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (4) Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

Untuk mencapai tujuan ini persyaratan Relasi secara umum adalah (1) Warga Negara Indonesia (2) Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun. (3) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat, (4) Berdomisili di wilayah setempat, (5) Non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir, (6) Memiliki komitmen menjadi relawan pemilu, (7) Terdaftar sebagai pemilih, (8) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, (9) Bertanggungjawab dan berakhlak baik (10) Bukan bagian dari penyelenggara pemilu (11) Memiliki pengalaman terkait kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan, (12) Tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana.

Khusus untuk Relasi pemilih pemula ada batasan maksimal yaitu 25 tahun. Ini mengandung arti agar antara komunikator (Relasi) dan komunikan (pemilih pemula) ada kedekatan emosional. Relasi juga bisa mengikuti pola komunikasi yang biasa dilakukan oleh pemilih pemula, misalnya pemanfaatan media sosial atau sarana lainnya yang menggunakan teknologi komunikasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Adi Suprpto dkk (2013) bahwa pemilih pemula menginginkan penggunaan media baru (new media) sebagai salah satu sarana bagi pendidikan politik, termasuk mensosialisasikan pemilu.

Rekrutmen Relasi dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/kota. Jumlah Relasi maksimal 25 orang per kabupaten/kota sehingga kalau segmen Relasi adalah lima segmen maka tiap segmen terdapat 5 Relasi. Rekrutment Relasi dilakukan secara terbuka di masing-masing kabupaten/kota atau berdasarkan usulan atau rekomendasi dari institusi strategis setiap komunitas.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa background atau latar belakang yang menjadi motivasi menjadi Relasi (a) coba-coba, (b) proses belajar, (c) mengisi waktu luang, (d) ingin mengetahui lebih banyak tentang pemilu sebelumnya tidak mau memilih, (d) mempraktekkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, (e) ajakan teman. Berdasarkan background ini tidak semua Relasi untuk segmen pemilih pemula mempunyai pemahaman yang cukup tentang politik, tentang pemilu, serta motivasi yang kuat tentang kehadiran mereka dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pemilih.

“...saya pada pemilu sebelumnya selalu golput atau tidak menggunakan hak pilih. Saya dulu golput karena tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang politik dan pemilu. Setelah saya sebagai Relasi saya ingin agar pemilih pemula mendapatkan informasi yang cukup tentang politik dan pemilu...” papar Rahmad mantan Relasi dari Gunungkidul. Hal ini juga dilakukan oleh Dwi Susanti, mantan Relasi dari KPUD Sleman.

Sementara Rifaat mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM mantan Relasi dari KPUD Bantul mengemukakan, motivasi utama menjadi Relasi adalah untuk mempraktekkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Hal itu juga dilakukan oleh mantan Relasi di KPU Kota Jogjakarta, Faisal dan Sari. Sementara Yoga yang selama ini aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan direkomendasikan oleh KPU Kota Jogjakarta.

“... saya sejak dulu suka politik. Informasi politik yang peroleh melalui media mass atau membaca buku politik. Ketika ada penawaran menjadi Relasi saya mendaftarkan diri menjadi Relasi segmen pemilih pemula. Saya berharap bisa berkontribusi pada pemilu 2014 dengan bekal yang saya miliki...” papar Pangkih mantan Relasi KPUD Kulonprogo.

Berdasarkan paparan di atas, keberagaman background Relasi untuk segmen pemilih pemula maka kompetensi Relasi perlu diperbaiki. Relasi mengemban tugas sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan yang bisa mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya secara cerdas maka Relasi ini mengikuti Training of trainer (ToT) untuk Relasi. Melalui ToT ini diharapkan bisa meningkatkan kompetensi Relasi sehingga tingkat partisipasi pemilih meningkat secara kuantitas maupun secara kualitas. Materi untuk peningkatan kompetensi Relasi mencakup (1) Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi, (2) Pemahaman tentang teknis tahapan pemilu yang strategis, (3) Kode etik relawan, (4). Teknik-teknik berkomunikasi publik, (5) Materi lain yang relevan.

Mengingat ada target khusus yang hendak dicapai oleh KPU dengan melakukan rekrutment Relasi untuk lima segmen strategis tadi yaitu meningkatkan partisipasi pemilih secara kuantitas maupun kualitas maka KPU secara terpusat juga sudah membuat pokok-pokok pesan yang perlu disosialisasikan. Pesan atau message yang akan disampaikan oleh Relasi kepada pemilih pemula menjadi aspek yang penting.

Dalam tugas Relasi menyampaikan materi tentang (1) Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi, (b) Tata cara pemberian suara dalam pemilu, (2) Pengenalan terhadap kontestan pemilu, (3) Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan

segmen. Metode yang dipakai yang disarankan dipakai untuk menyampaikan materi antara lain : simulasi, bermain peran/role playing, diskusi kelompok, ceramah penggunaan alat bantu (visual dan non visual), posting materi sosialisasi ke media sosial.

“....sebelum menjalankan tugas kami mengikuti bimtek (bimbingan teknis), tapi muatan tentang politik terbatas, lebih banyak tentang teknis pemilu. Namun alat peraga yang bisa lebih membantu memperjelas pesan terlambat diterima Relasi. Bimtek sebagai salah satu sarana meningkatkan kompetensi Relasi kurang efektif....,” tegas Rahmad mantan Relasi dari Gunungkidul.

Sari dari KPU Kota Jogjakarta menyebutkan, Bimtek hanya penjelasan teknis tentang kepemiluan yang disusun dalam buku saku, sementara metode penyampaian agar pemilih pemula dekat dengan politik tidak diberikan. Ia dan teman-temannya kebetulan memiliki background politik karena kuliah di JPP Fisipol UGM mencoba menyelipkan pengetahuan politik secara teoritis dan empiris agar mereka menjadi terbiasa dengan informasi politik.

Job deskripsion tugas Relasi juga membingungkan beberapa mantan Relasi, mereka hanya mensosialisasikan hal teknis tentang kepemiluan ataukah melakukan pendidikan politik secara holistik. Kalau hanya melakukan sosialisasi teknis kepemiluan alat peraga yang untuk Relasi terlambat sehingga menghambat pelaksanaan. Namun kalau melakukan pendidikan politik agar mereka lebih dekat politik waktunya sangat terbatas dibandingkan dengan luasnya dan besarnya kelompok pemilih pemula yang harus ditangani.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan mantan Relasi segmen pemilih pemula, dalam melaksanakan tugasnya ada satu password yang selalu ditegaskan dalam setiap menyampaikan pesan yaitu “satu suara bisa mengubah masa depan bangsa” dan “menjadi pemilih yang cerdas” selalu digunakan untuk menarik minat pemilih pemula menggunakan hak pilihnya.

Namun password ini tidak diikuti dengan konten pesan yang disampaikan pada saat sosialisasi dilakukan karena lebih banyak diisi untuk mensosialisasikan hal-hal teknis tentang Pemilu, mulai peserta pemilu, proses memilih dan cara memilih. Muatan pesan seperti ini kurang menjadi pendorong pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang cerdas.

Untuk mendorong menjadi pemilih yang cerdas maka materi sosialisasi harusnya menyentuh wilayah substansi yang bersifat jangka panjang. Wilayah substansial mencakup untuk apa pemilu diadakan, untuk apa partisipasi politik pemilih pemula sebagai warga negara diperlukan, apakah partisipasi politik hanya berhenti pada saat pelaksanaan pemilihan umum atau berlangsung terus menerus. Pemilih pemula adalah generasi masa depan yang tentunya tidak cukup hanya diberi pembekalan teknis.

“...pendidikan politik untuk pemilih pemula tidak bisa dicampur adukkan dengan materi informasi yang bersifat hal-hal teknis. Keterbatasan yang kami miliki kami berusaha mengenalkan “virus” politik agar mereka lebih dekat politik sehingga tidak hanya hal-hal yang sifatnya teknis. Namun kami akui apa yang kami lakukan belum bisa dikatakan berhasil...” Sari mantan Relasi KPU Kota Jogjakarta.

Relasi selain harus memperhatikan isi pesan yang akan disampaikan juga perlu mempunyai mapping terhadap kelompok sasaran. Mapping ini membantu Relasi mengidentifikasi kebutuhan sasaran, metode, jadwal waktu yang tepat melaksanakan kegiatan dan menyusun mitra kerja. Mitra kerja ini sangat dibutuhkan karena Relasi untuk bisa menemui pemilih pemula yang rata-rata masih duduk di bangku SMA.

Dalam FGD terungkap bahwa secara teknis Relasi untuk segmen pemilih pemula tidak mengalami kesulitan untuk menjalin mitra dengan pihak sekolah. Namun kendala utama adalah perijinan, serta penyesuaian waktu dengan kegiatan sekolah. Interaksi juga dijalin dengan organisasi kepemudaan seperti Karangtaruna.

Kemudahan menjalin interaksi juga didukung dengan kesadaran sekolah memberikan ruang untuk penyelenggaraan sosialisasi tentang pemilu. Relasi ini di beberapa sekolah juga bisa mempraktekan “pemilu” melalui pemilos (pemilihan Osis). Dilihat dari aspek kuantitas, kegiatan Relasi di segmen ini bisa dikatakan berhasil, namun aspek kualitas masih perlu diuji lagi. “... tidak ada gelombang penolakan atas kehadiran Relasi. Kami diterima dengan baik, tapi minim respon ketika diberi ruang untuk tanya jawab, banyak yang apatis...” papar Yoga dari KPU Kota Jogjakarta.

Apatis atau kurangnya respon pada Relasi ketika penyampaian materi sosialisasi menurut Iwan dari Bantul disebabkan pemilih pemula mendapatkan “contoh” yang kurang baik dari partai politik, mulai dari cara menyampaikan pesan, isi pesan hingga

kecurangan pelaksanaan pemilu yang bisa diakses melalui berbagai media. Secara tidak langsung contoh tersebut memberikan informasi yang kurang baik.

Berdasarkan dokumen laporan kegiatan relasi kegiatan yang dilakukan sebagian besar adalah sosialisasi tentang teknis pemilu. Segmen pemilih pemula, Relasi banyak bekerjasama dengan sekolah. Menurut Yoga, sekolah membuka diri untuk kegiatan relasi namun proses perijinan ke dinas pendidikan sering menjadi kendala. Untuk karang taruna biasanya relasi hadir dalam kegiatan pertemuan karangtaruna atau membuat janji guna menyelenggarakan pertemuan sendiri.

Selain persoalan di atas, problem lain yang dihadapi Relasi dalam melaksanakan tugasnya adalah sikap independensi. Aspek ini penting karena menghindari jangan sampai Relasi menjadi “perpanjangan tangan parpol” tertentu. Kekhawatiran akan hal ini bukan tanpa alasan karena posisi Relasi ini sangat strategis yaitu bersentuhan dengan konstituen. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam melaksanakan tugasnya Relasi ini di atur dengan kode etik. Kode etik relawan mencakup (1) Bersikap independen, imparial, dan non partisan terhadap peserta pemilu, (2) Tidak melakukan tindak kekerasan, (3) Menghormati adat dan budaya setempat, (4) Tidak bertindak diskriminatif, (5) Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi.

Kode etik ini sangat membantu Relasi tatkala menghadapi pertanyaan dari segmen yang menjadi sasaran kegiatan terkait calon atau partai mana yang dipilih. Menurut Mumainah mantan Relasi dari Kulonprogo mengemukakan, pihaknya sering ditanya tentang siapa yang sebaiknya dipilih baik kandidat atau nama parpol. Adanya kode etik tersebut, pihaknya hanya mendorong agar pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas dengan mencoba mencari track record kandidat dan mencermati program-programnya. “... kode etik tersebut sangat membantu kami untuk tidak keluar dari tujuan dan keberadaan kami ketika menyampaikan informasi tentang kepemiluan. Kami juga tidak terjebak untuk berbicara soal partai atau kandidat tertentu....,” papar Mumainah.

Keberadaan Relasi ini hanya terbatas pada pemilu legislatif dan DPP. Mereka segera dibubarkan begitu pemilu selesai. Pada saat pemilu presiden Relasi ini tidak lagi diminta sebagai patner untuk kegiatan KPU. Bahkan setelah pemilu usai, KPU

kota/kabupaten tidak mencoba melibatkan mereka sebagai agen untuk “menebarkan virus” politik kepada pemilih pemula agar mereka tidak “buta” politik.

III. Diskusi

Menggunakan hak pilih pada saat Pemilu, baik legislatif, DPD atau presiden bukanlah sebuah kewajiban bagi setiap warga negara, tetapi hak. Memilih adalah hak maka tidak ada satu paksaan agar warga negara harus datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ukuran keberhasilan suatu pelaksanaan pemilu bukan semata-mata dihitung berdasarkan jumlah pemilih yang datang ke TPS, tetapi bagaimana warga negara memahami keberadaannya atau arti penting pemilu bagi dirinya selaku warga negara masyarakat yang demokratis.

Dalam konsep seperti ini, mendorong orang bersedia menggunakan hak pilih atau peduli dengan pemilu bukanlah sebuah pekerjaan yang pragmatis, sesaat dan dilabeli dalam sebuah “project” pesta demokrasi. Ada persoalan yang lebih esensial yaitu membuka pemikiran kepada warga negara bahwa pemilu adalah sebuah sarana untuk terjadinya perubahan kepemimpinan yang paling damai dan paling konstitusional.

Menyampaikan pesan seperti ini kepada masyarakat tidak mudah karena masyarakat harus diyakinkan dan perlu ada contoh. Hiruk pikuk kompleksitas persoalan politik di legislatif, eksekutif yang tercover oleh media juga menjadi faktor hilangnya trus masyarakat akan pentingnya pemilu sebagai sarana untuk pergantian sebuah pemerintahan yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Bukan hal yang aneh apabila pasca reformasi tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih ada kecenderungan mengalami penurunan.

Pada pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum(KPU) mempunyai tekad untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemilih. Salah satu strateginya adalah merecrut anggota masyarakat sebagai salah satu “agen” untuk mendekati lima kelompok strategis yang selama dinilai tidak menggunakan hak pilihnya yaitu segmen kelompok pemilih pemula, kelompok agama, kelompok disabilitas, kelompok marginal dan kelompok perempuan. Mereka ini oleh KPU dinamakan Relawan Demokrasi (Relasi). Seleksi Relasi dilakukan secara terbuka dan transparan. Relasi ini beroperasi di tingkat kabupaten/kota dan jumlahnya maksimal 5 orang untuk setiap segmen.

Bisa dikatakan Relasi ini menjadi komunikator politik yang akan menyampaikan pesan politik, khususnya tentang pemilu kepada komunikan di lima segmen strategis tujuan akhirnya meningkatkan kuantitas dan kualitas pemilih pada pemilu 2014. Kompetensi Relasi dilakukan KPU melalui bimbingan teknis (bimtek) tentang segala hal yang terkait tentang pemilu.

Dalam penelitian ini yang mengambil studi kasus di DIY, secara kuantitatif Relasi “berhasil” dalam menjalankan tugasnya sebagai komunikator politik. Indikatornya, tingkat partisipasi pemilih di DIY Pemilu 2014 mencapai 80,2 % dan tingkat nasional 72,97 %. Namun dari aspek kualitas masih perlu ditelaah lebih jauh karena indikator keberhasilan secara kualitas tidak hanya mereka datang ke bilik suara menggunakan hak pilihnya, tetapi memahami untuk apa mereka memilih atau menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan penelitian, aktivitas relasi kelompok pemilih pemula sebagai komunikator politik belum mampu menyentuh pada persoalan substansi tetapi lebih pada persoalan teknis administratif dalam menggunakan hak pilihnya. Password yang digunakan “satu suara bisa mengubah masa depan bangsa” dan “menjadi pemilih yang cerdas” tidak diikuti dengan bekal yang cukup untuk menjelaskan secara mendalam terkait dengan pemilu, misalnya bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, bagaimana mereka akan menentukan pilihan. Paling penting lagi Relasi ini belum memberikan pemahaman tentang keberadaan warga negara dalam pemilu.

KPU yang mempunyai niat baik dengan melibatkan Relasi sebagai patner juga tidak mampu menjaga kontinuitas komunikasi dengan mantan Relasi. Bisa dikatakan Relasi adalah program by project. Dalam posisi seperti ini Relasi sebagai komunikator politik belum mampu membawa perubahan secara signifikan atau berkelanjutan.

Relasi punya keinginan untuk bisa menjadi agen untuk menyebarkan virus politik tetapi keberadaan mereka selesai begitu hajatan pemilu selesai. Ini sangat disayangkan, keberadaan Relasi harusnya terus dijaga sebagai patner bagi KPU untuk menjangkau segmen masyarakat yang strategis.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian beberapa simpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Program Relasi belum mampu membantu KPU Kota/Kabupaten untuk mensosialisasikan persoalan yang substansial dari Pemilu, tapi masih terjebak pada persoalan teknis. Untuk memperbaiki hal ini KPU Kota/Kabupaten perlu melakukan pengembangan materi pembekalan pada saat dilakukan Bimbingan Teknis.
2. Mengingat tujuan utama keberadaan Relasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemilih maka mekanisme seleksi Relawan Demokrasi diperbaiki. Latar belakang pengetahuan politik menjadi indikator seleksi, khususnya untuk pemilih pemula sehingga bisa melakukan pengembangan atas pesan yang akan disampaikan.
3. Relawan Demokrasi perlu tetap dipertahankan oleh KPU kota/kabupaten untuk menjadi agen dalam menyebarkan virus politik kepada pemilih, khususnya segmen pemilih pemula.

Daftar Pustaka

- Amin, Mulyanto, 2014, *Peran Serta Relawan Demokrasi dalam Usaha MeningkatkanPartisipasiPemilih*, Hotel Garda Plaza, Sumatera Utara.
- Ahdiyana, Marita, 2009, Pemilu sebagai wahana Pendidikan Politik, Pidato Ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXX STIA-AAN, 13 Juni 2009.
- Anggorowati, Ningrum Puporini, 2011, Penerapan Model Pembelajaran Tutir pada Mata Pelajaran Sosiologi, *Jurnal Komunitas*, 3 (1) : 103-120
- Apriliaswati, Rahayu, Promoting Peer Interaction to Develop Social Skill, 2011, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, Vol.2 No.2 Oktober.
- Azra, Azyumardi, 2006, Paradigma baru Pendidikan Nasional : Rekonstruksi dan Demokratisasi Cet.2, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Bafadal, Ibrahim, 2003 *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Masykuri Bakri (ed.), Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang kerjasama dengan Visipress, Surabaya.
- Budiarjo, Mariam, 2009 , *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Batawi, JW, 2013, *Tingkat Kesadaran Pemilih Pemula dalam Pilkada*, Jurnal Uniera Volime 2 Nomo2 ISSN 2086-0404.
- Effendi,.Novan Fahlevi , 2009. Orientasi pemilih pemula pada Pemilu Presiden 2009 (Studi Pada Siswa-Siswi SMAN 12 & SMA Unila Bandar Lampung), Skripsi.
- Fakih, Mansour, 2000, Pendidikan Populer (Membangun Kesadaran Kritis), Cetakan Pertama, Desember, REaD Book, Yogyakarta.
- Firdaus, Mohammad, 2003, *Dampak Pendidikan Politik yang dilakukan PPSW terhadap Partisipasi Politik Perempuan Lapis Bawah (Studi Kasus Anggota Kelompok Perempuan*

- Melati di Pondok Rangon* , Tesis, Program Studi Sosiologi, Kekhususan Manajemen Pembangunan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia
- KPU Provinsi DIY, 2011, Pemilu 2009, Pemilukada 2010 dan 2011 di Provinsi DIY dalam angka, Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Press
- Makalunsenge, Indrus dkk, 2014, *Pengaruh Reklame Politik Pilwako terhadap Sikap Pemilih Pemula di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat*, Jurnal Acta Diurna, Vol. III.No 3 tahun 2014
- Mantra, Ida Bagoes, 2004, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mardatillah, 2010, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Munculnya Golput, (Studi Masyarakat Kecamatan Medan Amplas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009)*, Skripsi, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan
- Miles, M.B. and Huberman, A.M, 1994, *Qualitative Data Analysis : A sourcebook of New Methods*, London, SAGE Publications.
- Mujtahid, Igbal, 2013, Pendidikan Politik Terbapdi bagi Masyarakat Mneuju Pemilu 2014 Sesuai dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, Call of Paper Fisip Universitas Terbuka.
- Muzzakar, Milastri, 2010, *Pendidikan Alternatif sebagai Model Pemberdayaan Perempuan di Sekolah Perempuan Ciliwung di Rawajati Barat Jakarta*, Skripsi, Jurusan Pengembangan Dakwah Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Nasiwan, 2005, *Model Pendidikan Politik : Studi kasus PKS DPD Sleman*, Yogyakarta, Cakrawala Pendidikan, November, Th. XXIV, No. 3
- Piliang, Indra J. 2008. *Kaum Remaja dan Demokrasi*. Jakarta; Kibar.
- Prihatmoko, Joko J, 2009, *Ancaman Krisis dan Ikhtisar Sistemis KPU dalam Pengembangan Demokrasi Elektoral-Formal*, Makalah dalam diskusi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta dengan tema “Wajah Demokrasi di Indonesia” di Semarang, 30-31 Maret 2009.
- Pambudi, Himawan S, Erry Syahrian, Yanuardi. 2003. *Politik Pemberdayaan. Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama
- Rubyanti, Rika, 2009, *Pengaruh Popularitas terhadap Pilihan Pemilih pemula(Fenomena masuknya artis dalam politik)*, Skripsi, Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Setiajid, 2011, *Orientasi Politik yang Mempengaruhi Orientasi pemilih pemula dalam Menggunakan Hak Pilihnya* pada Pemilihan Walikota Semarang tahun 2010, *Integralistik*, No.1/Th. XXII/2011, Januari-Juni, pp.18-33.
- Subakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sukardi, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Cetakan ke delapan, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

- Sukemi, BM. 2004. *Sikap dan Perilaku Politik Anggota badan Legislatif Daerah ditinjau dari Sosialisasi Politik*. Disertasi. Yogyakarta : Program Pasca Sarjana UGM.
- Sulastri, Endang 2011, *Peran Pendidikan Pemilih melalui mata pelajaran PKn untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu (Kada)*, Materi Sosialisasi Guru PKn, Jakarta.
- Sumarno, AP, 2002, *Komunikasi Politik*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta
- Suprojo, 2014. *Agung Analisis Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula Pasca ketetapan Komisi Pemilihan Umum tentang 10 partai peserta pemilu 2014 dalam pembangunan politik masyarakat*, jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/.../25
- Syafe'i, Imam , 2006, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Kritis, *Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 2, Nomor 1, Juni hal.12.
- Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.